SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

DEMOKRASI INDONESIA: PERKEMBANGAN, TANTANGAN, DAN PROSPEK MASA DEPAN

Indonesian Democracy: Development, Challenges and Future Prospects

Sri Yanti [1*]

Siti Noor Aida [2]

Siti Hasanah [3]

Saidatul Adawiyah [4]

*1-4 Universitas Sapta Mandiri

*email:
sriyanti8879@gmail.com

Abstrak

Sejak kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami transformasi politik yang signifikan, beralih dari pemerintahan otoriter menuju sistem demokrasi multipartai yang lebih terbuka. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan demokrasi Indonesia setelah Reformasi 1998, dengan menyoroti aspek-aspek penting seperti pemilu, kebebasan pers, hak asasi manusia, serta tantangan-tantangan utama yang dihadapi. Selain itu, artikel ini juga mengkaji prospek masa depan demokrasi Indonesia di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi. Meskipun kemajuan telah tercapai, tantangan seperti korupsi, polarisasi politik, dan ketimpangan sosial masih menjadi masalah besar. Artikel ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk memperkuat demokrasi Indonesia, termasuk reformasi pendidikan politik dan peningkatan peran masyarakat sipil.

Kata Kunci:
Demokrasi Indonesia,
Perkembangan,
Tantangan,
Prospek

Keywords:
Indonesian Democracy,
Development,
Challenges,
Prospects

Abstract

Since the fall of the New Order regime in 1998, Indonesia has experienced a significant political transformation, moving from authoritarian rule to a more open multiparty democratic system. This article aims to evaluate the development of Indonesian democracy after the 1998 Reformation, by highlighting important aspects such as elections, press freedom, human rights, as well as the main challenges faced. Apart from that, this article also examines the future prospects of Indonesian democracy in the era of globalization and technological progress. Although progress has been made, challenges such as corruption, political polarization and social inequality remain major problems. This article proposes several recommendations to strengthen Indonesian democracy, including political education reform and increasing the role of civil society.

PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia mengalami transisi besar setelah kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998. Sebelumnya, Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Pasca-Reformasi, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan demokratis dengan pemilihan umum yang langsung dan terbuka, memberikan kebebasan politik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah negara. Namun, meskipun telah banyak mengalami kemajuan dalam aspek kebebasan politik dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi, demokrasi Indonesia tetap menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan, seperti masalah korupsi, polarisasi sosial, dan ketidaksetaraan ekonomi.Artikel ini berfokus pada analisis perkembangan, tantangan, sertaprospek demokrasi Indonesia di masa depan.

Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui Pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun

pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilainilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan dalam Menyusun artikel ini adalah metode kualitatif. Kami melakukan penelitian terhadap mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sapta Mandiri khususnya di dalam lingkup Program studi PGSD Universitas Sapta Mandiri Balangan. Pengamatan dilakukan melalui perilaku sehari-hari mahasiswa saat berada di lingkungan kampus dan saat pembelajaran berlangsung tentang bagaimana mahasiswa untuk mengetahui dan memaparkan proses pengembangan nilai-nilai Demokrasi Indonesia melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi Indonesia

Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan peminpin kepada rakya, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalamm sejarah ketatanan republik indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi (pasang surut). Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratisndalam masyarakat yang plural. Menurut Juliardi fluktasi demokrasi indonesia pada hakekarnya dapat dibagi dalam 5 periode:

1. Priode 1945-1949 dengan sistem demokrasi pancasila pada priode ini sistem pemerintahan demokrasi pancasila seperti yang diamanatkan UUD 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan.
2. Priode 1949-1959 dengan sistem demokrasi parlementer priode ini sangan menonjolkan peranan parlemen dan partai politik.
3. Priode 1959-1965 dengan sistem demokrasi terpimpin sistem merupakan sistem demokrasi yang menyimpang dari konstitusional priode ini juga sering disebut dengan orde lama.
4. Priode 1965-1998 dengan sistem demokrasi pancasila(orde baru), demokrasi pancasila era orde baru yang merupakan demokrasi konstotusional yang menojolkan sistem peredensial.
5. Priode 1998-sekarang dengan sistem demokrasi pancasila(orde reformasi) demokrasi pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multi partai yang berpaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara.

Macam-Macam Demokrasi

1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat

a. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara.

b. Demokrasi tidaklangsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen.

2. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara.
   a. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat diparlemen namun tetap di kontrol oleh referendum.
   b. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang didalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif.
   c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan merupakan sistem demokrasi dimana kedudukan antara eksekutif dengan legislatif tepisah, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem parlemen.
   d. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiiatif rakyat merupakan sistem demokrasi gabungan dari demokrasi perwakilan/tidak langsung dan demokrasi secara langsung
3. Berdasarkan prinsip ideologi
   a. Demokrasi liberal berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan suatu kebebsan setiap individu dan sering mengabaikan kepentingan umum.
   b. Demokrasi rakyat berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasari dri paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum.
   c. Demokrasi pancasila yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakatyang mengutamakan kepentingan umum.

Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia

Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama pada pelaksana kekuasaan, harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuaasaan tertinggi. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih bagi jabatan tersebut atau jabatan dibidang kekuasaan lainnya.
2. Orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dengan status suatu anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lajim disebut parlemen (lembaga legislatif), haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali.
3. Tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Diantaranya tidak boleh ada pemilikan istimewa pada jabatan apapun karena adanya ketetapan UUD atau UU walau dengan lasan apapun
4. Harus ada UU yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya.

Ciri-Ciri Demokrasi

Kata "demokrasi" seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian. Namun, diantara banyaknya pengertian yang berbeda terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan unuversalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Hendry B. Mayo, misalnya, mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak, yaitu:

1. Adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan suka rela.
2. Adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Adanya pergantian penguasa yangberlangsung secara teratur.
4. Adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan cara minimum.
5. Adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman
6. Adanya jaminan penegakan keadilan.
7. Adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan.
8. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Unsur-Unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi

Tegaknya demokrasi sebagai tatanan kehidupan kenegaraan sangat tergantung pada unsur-unsur penopang tegaknya deemokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting tersebut antara lain:

1. Negara hukum Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan HAM.
2. Masyarakat madani Masyarakat madani yakni sebuah 24asyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisifasi aktif dalam menegakkan demokrasi.
3. Aliansi kelompok strategis Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok 24asyara dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan termasuk di dalamnya pres yang bebas dan bertanggung jawab.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi

1. Transisi Politik Pasca-Orde Baru.

   Reformasi 1998 yang dipicu oleh krisis ekonomi Asia telah menggulingkan pemerintahan Orde Baru yang otoriter. Indonesia memasuki fase transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka dengan beberapa perubahan mendasar. Pemilu langsung pertama kali diadakan pada tahun 2004, yang memungkinkan rakyat memilih presiden secara langsung, bukan lagi melalui MPR. Seiring berjalannya waktu, sistem multipartai yang lebih 24asyarakat24 juga terbentuk, memberi ruang bagi berbagai ideologi dan kelompok politik untuk berkompetisi. Proses ini ditandai dengan reformasi politik yang mencakup pembentukan lembaga baru seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan lembaga ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan mengurangi praktik manipulasi politik.
2. Kebebasan Pers dan Media

   Salah satu perubahan terbesar setelah Reformasi adalah kebebasan pers yang jauh lebih besar dibandingkan masa Orde Baru. Media massa, baik cetak, elektronik, maupun online, mendapatkan kebebasan untuk melaporkan isu-isu kritis tanpa takut akan sensor dari pemerintah. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan dasar hukum bagi kebebasan pers. Hal ini membawa dampak positif pada pengawasan pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam diskursus politik.Namun, meskipun kebebasan pers berkembang pesat, masalah seperti penyebaran hoaks dan konsentrasi media di tangan segelintir kelompok bisnis dan politik masih menjadi tantangan besar bagi kualitas informasi yang diterima Masyarakat.
3. Sistem Pemilu dan Representasi Politik

Pemilu Indonesia pasca-Reformasi telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari pemilu berbasis proporsional, pemilu langsung untuk presiden, hingga pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merepresentasikan daerah-daerah di Indonesia. Namun, meskipun sistem pemilu yang lebih terbuka memungkinkan banyak partai berkompetisi, beberapa masalah mendasar tetap ada, termasuk politik uang, kecurangan pemilu, dan kurangnya kualitas politisi yang berkompeten. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas representasi politik. Banyak partai politik lebih fokus pada elektabilitas jangka pendek, sehingga program-program yang lebih substantif dan berbasis pada kepentingan rakyat sering kali terabaikan.

Tantangan Demokrasi di Indonesia

1. Korupsi dan Kelemahan Institusi Hukum

   Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi demokrasi Indonesia. Meskipun lembaga seperti KPK telah berhasil mengungkapkan banyak kasus korupsi, praktik korupsi masih sangat mengakar di berbagai lapisan pemerintahan dan sektor swasta. Korupsi menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, melemahkan kinerja pemerintah, dan merusak fondasi demokrasi.Selain itu, meskipun sistem hukum Indonesia telah direformasi, penegakan hukum masih lemah. Banyak kasus hukum yang melibatkan pejabat publik tidak mendapatkan proses yang adil, sementara masyarakat miskin sering kali tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai.
2. Polarisasi Politik dan Sosial

   Polarisasi politik semakin meningkat, terutama menjelang pemilu dan dalam berbagai isu sosial-politik. Fenomena ini semakin diperburuk oleh media sosial yang menjadi medan pertempuran ideologi politik. Ketegangan antara kelompok pendukung yang berbeda, baik di tingkat nasional maupun lokal, menciptakan ketidakstabilan sosial dan memperburuk hubungan antarwarga negara. Polarisasi politik juga mempengaruhi kebijakan publik, yang lebih berfokus pada kemenangan jangka pendek daripada solusi jangka panjang untuk masalah negara.
3. Metimpangan Sosial dan Ekonomi

   Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah besar. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang tidak merata menyebabkan banyak warga negara merasa terpinggirkan. Ketimpangan ini menghambat partisipasi politik yang lebih inklusif dan memperburuk polarisasi sosial yang ada.
4. Kebebasan Berpendapat dan Hak Asasi Manusia

   Meski kebebasan berpendapat telah menjadi salah satu pencapaian besar Indonesia, namun ada ancaman terhadap kebebasan berekspresi, terutama bagi kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintah. Kasus penangkapan terhadap aktivis atau pembatasan kebebasan berkumpul dan berserikat menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan politik dan kontrol pemerintah terhadap oposisi.

Prospek Demokrasi Indonesia ke Depan

1. Era Globalisasi dan Teknologi

   Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi memberikan tantangan dan peluang bagi demokrasi Indonesia. Media sosial memberikan platform bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam proses politik, tetapi juga menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan disinformasi. Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar dapat memanfaatkan teknologi untuk menguatkan demokrasi, bukan untuk merusaknya.

2. Reformasi Pendidikan dan Partisipasi Politik

   Untuk memperkuat demokrasi Indonesia, diperlukan reformasi pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Pendidikan politik yang berbasis pada pemahaman tentang hak-hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik sangat penting. Selain itu, pemberdayaan masyarakat sipil dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi seperti KPU dan Bawaslu perlu terus dilakukan untuk memastikan sistem demokrasi yang lebih baik.

3. Penguatan Masyarakat Sipil dan Pengawasan

   Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Organisasi non-pemerintah, media, dan komunitas lokal perlu terus mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Penguatan demokrasi memerlukan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, untuk memastikan bahwa sistem politik melayani kepentingan rakyat secara adil dan merata.

KESIMPULAN

Demokrasi Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan sejak era Reformasi 1998, namun banyak tantangan yang masih harus dihadapi untuk menjaga dan memperkuat demokrasi. Korupsi, polarisasi politik, ketimpangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia adalah tantangan utama yang perlu diatasi. Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada komitmen untuk reformasi institusi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi yang tepat untuk memperkuat kebebasan dan transparansi.

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Kata "demokrasi" seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian. Namun, diantara banyaknya pengertian yang berbeda terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan unuversalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut.

Dan juga demokrasi Indonesia terus berkembang, namun menghadapi tantangan yang tidak mudah dihadapi, termasuk politik identitas, kesenjangan sosial-ekonomi, dan peran media. Agar demokrasi di Indonesia semakin matang, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas pendidikan politik, memperbaiki sistem ekonomi, serta memastikan keberagaman dapat menjadi kekuatan yang memperkuat negara, bukan sebaliknya.

REFERENSI

Alatas, S. F. (2013). *Democracy and the Role of Civil Society in Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cendekia.

Azhar, R. (2020). Demokrasi dan Politik Indonesia Pasca-Reformasi. Jakarta: Penerbit Politik.

Budi, A. (2019). Pemilu dan Demokrasi di Indonesia: Sebuah Evaluasi. Yogyakarta: LKiS.

Choi, H., & Lee, S. (2017). *Populism and Identity Politics in Southeast Asia*. Asian Politics Review, 12(4), 23-40.

Firdaus, M. (2020). *Kesenjangan Sosial di Era Demokrasi Indonesia: Analisis Ekonomi Politik*. Jurnal Ekonomi Politik, 15(1), 71-89.

Latifah, L., & Ngalimun, N. (2023). Pemulihan Pendidikan Pasca Pandemi Melalui Transformasi Digital Dengan Pendekatan Manajemen Pendidikan Islam Di Era Society 5.0. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, *5*(1), 41-50.

Latifah, L., Ngalimun, N., Setiawan, M. A., & Harun, M. H. (2020). Kecakapan Behavioral Dalam Proses Pembelajaran PAI Melalui Komunikasi Interpersonal: *Bitnet: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, *5*(2), 36-42.

Mawardi, A. D. (2023). Studi Tingkat Konsistensi Penulisan Format Sitasi Pada Jurnal Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, *2*(1), 49-53.

Nasution, I. (2019). *Media Sosial dan Politik Identitas: Dampaknya terhadap Demokrasi Indonesia*. Jurnal Komunikasi Indonesia, 8(3), 102-120.

Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(1), 265-278.

Siregar, D. (2018). *Membangun Demokrasi yang Inklusif di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suprapti, S., Ilmiyah, N., Latifah, L., & Handayani, N. F. (2022). Islamic Aqidah Learning Management to Explore the Potential of Madrasah Students. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, *5*(1), 4664-4673.

Taufik, A. (2022). *Reformasi Politik dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Kencan